

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi S1 Akuntansi



Disusun Oleh :

Wiwi Febiyana Prasetiawati

31402100027

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan
dengan Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai Variabel Moderasi
Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**

Disusun Oleh :

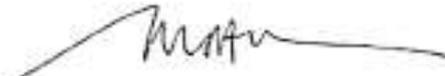
Wiwi Febiyana Prasetyawati

NIM : 31402100027

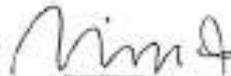
Telah disetujui sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Semarang, 02 Juni 2025

Dosen Reviewer

Dosen Pembimbing



Dra. Osmad Mutaker, SE., MSI., AK., AWP Syariah., CSFT
NIK. 210403050



Dr. Dra. Winarsih, SE., MSI., CSRS., SRA
NIK. 211415029

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Provitri Wijayanti, SE., MSI., Ph.D., AK., IEP., AWP
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Wiwi Febiyana Prasetiawati

NIM : 31402100027

Program Studi: S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dengan cara yang baik sesuai dengan kode etik atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran kode etik ilmiah dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Wiwi Febiyana Prasetiawati

NIM. 31402100027

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwi Febiyana Prasetiawati

NIM : 31402100027

Program Studi: S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang menyatakan,



Wiwi Febiyana Prasetiawati
NIM. 31402100027

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of regional original income and capital expenditure on financial performance with economic growth as a moderation variable. The population in this study covers 35 districts/cities in Central Java Province in 2021-2023. The number of samples in this study is 35 districts/cities. The sampling technique uses the census method. The research method used is quantitative with a data source in the form of secondary data. The data analysis method uses Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS version 29. The results of this study show that capital expenditure has been proven to have an effect on financial performance, economic growth has been proven to be able to moderate the influence of regional original income on financial performance, regional original income has not been proven to have an effect on financial performance, economic growth has not been proven to be able to moderate the influence of capital expenditure on financial performance.

Keywords : *Regional Original Income, Capital Expenditure, Financial Performance, Economic Growth*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan sumber data berupa data sekunder. Metode analisis data menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan SPSS versi 29. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi terbukti mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan, pendapatan asli daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi

INTISARI

Kinerja keuangan menunjukkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan lain-lain yang memegang peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, adanya pertumbuhan ekonomi menjadi variabel moderasi yang penting untuk mengetahui pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan PAD melalui perluasan basis pajak dan meningkatkan efisiensi belanja modal, sehingga dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Pada hal ini keberadaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi bertindak sebagai agen yang dipercaya oleh masyarakat (principal) yang diwakili oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber kekayaan daerah dengan baik dan optimal. Oleh karena itu, sebagai agen dalam teori *stewardship*, pemerintah daerah akan melakukan hal tersebut bekerja sebaik-baiknya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya daerah dan keuangan untuk mencapai harapan masyarakat yang diinginkan yaitu kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mempunyai empat hipotesis yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam menganalisa berupa angka-angka untuk menguji seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data melalui situs resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jateng pada situs <https://jateng.bps.go.id/id>, situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melalui situs resmi masing-masing.

Hasil penelitian ini menunjukkan Belanja Modal terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi terbukti mampu memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi tidak terbukti mampu memoderasi hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH”**. Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses bimbingan skripsi peneliti mendapatkan motivasi dan dukungan dari pihak lain, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam menyusun skripsi ini.
4. Seluruh Dosen maupun staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan serta menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran.

5. Bapak Imam Purnomo & Ibu Purwati selaku orang tua penulis yang telah membesarkan, membiayai segala kebutuhan, memberi semangat serta doa yang tiada hentinya, supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
6. Tomi Nofriyanto selaku kakak kandung penulis yang telah memberi semangat dan memotivasi penulis untuk selalu semangat dalam mencapai kesuksesan dimasa yang akan datang supaya bisa membahagiakannya.
7. Danis Dwi Saputra selaku partner terdekat. Terima kasih telah hadir dalam hidup penulis, selalu menemani dan meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah untuk meraih impian. Serta berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi.
8. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi penulis semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Semarang, 14 Mei 2025

Penulis



Wiwi Febiyana Prasetiawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i> (<i>Stewardship Theory</i>)	13
2.2 Variabel Penelitian	15
2.2.1 Kinerja Keuangan	15
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah	17
2.2.3 Belanja Modal	20
2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi	23
2.3 Penelitian Terdahulu	24
2.3.1 Penelitian terdahulu tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan	24

2.3.2 Penelitian terdahulu tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.....	27
2.4 Kerangka Pemikiran	30
2.5 Pengembangan Hipotesis	33
2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan .	33
2.5.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	34
2.5.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi	35
2.5.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Populasi dan Sampel	38
3.2.1 Populasi	38
3.2.2 Sampel	39
3.3 Jenis dan Sumber data	39
3.3.1 Jenis Data	39
3.3.2 Sumber Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	40
3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel	40
3.5.1 Variabel Dependen (Y)	40
3.5.2 Variabel Independen (X)	41
3.5.3 Variabel Moderasi (Z)	43
3.6 Teknik Analisis Data	46
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	47
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	47
3.6.3 Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	50
3.6.4 Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	51
3.6.5 Pengujian Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian	55

4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.2	Analisis data	56
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	56
4.3	Uji Asumsi Klasik	59
4.3.1	Uji Normalitas	59
4.3.2	Uji Multikolinieritas	59
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	60
4.3.4	Uji Autokorelasi	61
4.4	Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	61
4.5	Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	64
4.5.1	Uji F	64
4.5.2	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	64
4.6	Pengujian Hipotesis	65
4.7	Pembahasan	66
4.7.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan	66
4.7.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	67
4.7.3	Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan	68
4.7.4	Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	69
BAB V	PENUTUP.....	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Keterbatasan Penelitian	72
5.3	Saran	73
DAFTAR	PUSTAKA	75
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan	25
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	28
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	45
Tabel 3.2 Kriteria Pengujian Durbin-Watson	50
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian	56
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	57
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ..	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	61
Tabel 4.7 Hasil Uji MRA	62
Tabel 4.8 Hasil Uji F	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah 2021 – 2023	5
Gambar 1.2 Grafik Belanja Modal 2021 – 2023	5
Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi 2021 – 2023	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data	79
Lampiran 2 Hasil Output SPSS	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tolak ukur utama tercapainya suatu pekerjaan (Fuad & Handayani, 2020). Kinerja keuangan menunjukkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan lain-lain yang memegang peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk tertib dan transparan dalam mengelola keuangan daerah (Fuad et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Padang & Padang, 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Amanda & Praptoyo, 2023). PAD memiliki peran krusial dalam menopang kinerja keuangan pemerintah daerah, karena pendapatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam

mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Ketergantungan pemerintah daerah pada PAD yang optimal akan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memberikan otonomi yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, peningkatan PAD juga dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Amanda & Praptoyo, 2023), (Atmoko & Khairudin, 2022), (Padang & Padang, 2023), (Noeng et al., 2023), dan (Bilqis & Priyono, 2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD terjadi adanya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara efektif, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Sedangkan (Angraini & Hidayat, 2023) dalam penelitiannya memperoleh hasil adanya pengaruh negatif PAD terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh (Aslindar et al., 2022) dan memperoleh hasil, PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa adanya peningkatan PAD belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan.

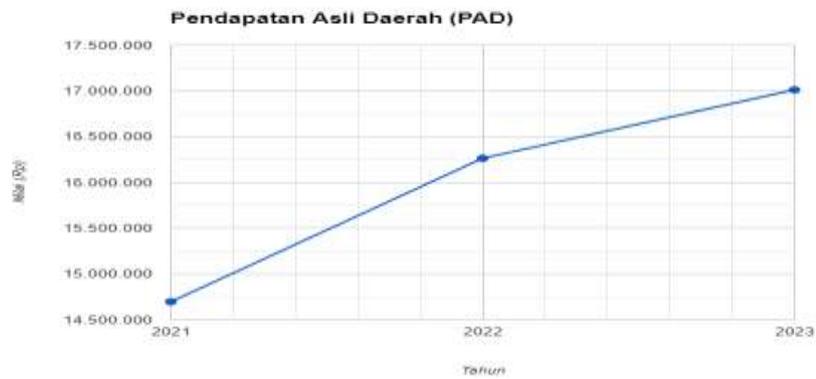
Terdapat faktor lain selain PAD yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu Belanja Modal. Belanja modal adalah suatu belanja pemerintah daerah yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan meningkatkan alokasi belanja modal, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan

produktivitas masyarakat dan pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Bilqis & Priyono, 2023) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan perputaran belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal guna meningkatkan kepercayaan publik dan produktivitas masyarakat.

Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti (Lestari & Nurkhin, 2023), (Ramadana et al., 2023), (Burhan et al., 2022), (Noeng et al., 2023), dan (Sinatraz & Suhartono, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Bilqis & Priyono, 2023) menemukan hasil berbeda, bahwa belanja modal justru memberikan dampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dari penelitian (Padang & Padang, 2023) dalam hasil penelitiannya belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rendahnya alokasi belanja modal yang tidak mampu merangsang partisipasi publik dan lambatnya realisasi proyek infrastruktur serta fasilitas publik menjadi penyebab utama belanja modal belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Akibatnya, belanja modal tidak berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Atmoko & Khairudin, 2022), yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

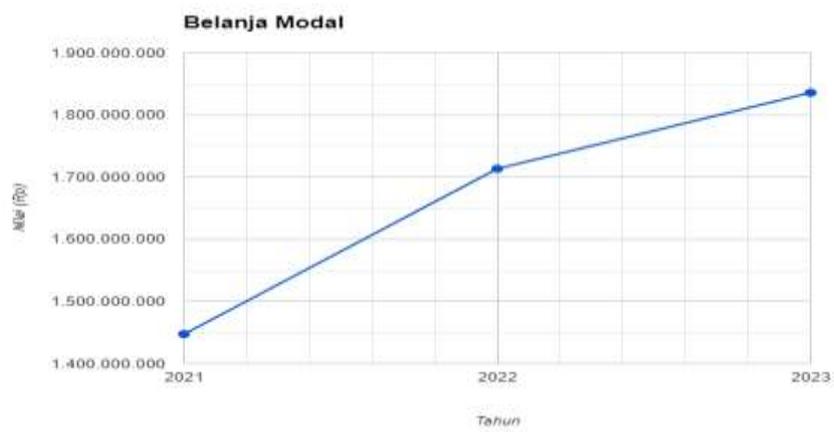
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Bilqis & Priyono, 2023). Dalam hasil penelitiannya Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Bilqis & Priyono, 2023) yaitu peneliti menambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi yang mengacu pada penelitian (Haq & Syamsuddin, 2024). Dari penelitian tersebut dapat diketahui, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga potensi PAD dan Belanja Modal akan semakin besar. Ini berarti, pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan positif pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, adanya pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi perlu ditambahkan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto riil. Produk Domestik Bruto sendiri merupakan total volume produk pada suatu periode (Haq & Syamsuddin, 2024). Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi menjadi variabel moderasi yang penting untuk mengetahui pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan PAD melalui perluasan basis pajak dan meningkatkan efisiensi belanja modal, sehingga dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif.



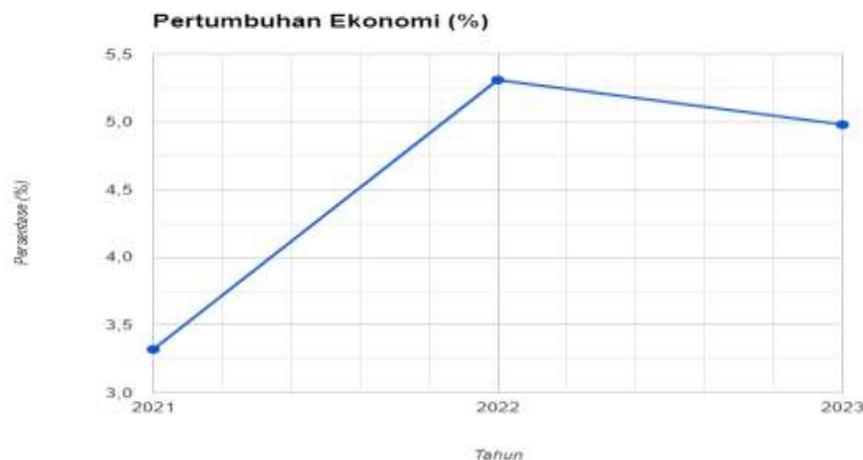
Gambar 1.1

Grafik Pendapatan Asli Daerah 2021 – 2023



Gambar 1.2

Grafik Belanja Modal 2021 - 2023



Gambar 1.3
Grafik Pertumbuhan Ekonomi 2021 – 2023

Periode 2021-2023 merupakan periode yang menarik untuk dikaji. pasca pandemi COVID-19, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam pemulihan ekonomi. Grafik yang sudah disajikan diatas diambil dari BPS Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan adanya tren peningkatan PAD dan belanja modal selama periode tersebut, yaitu berturut-turut sebesar Rp14,698 juta, Rp16,265 juta, dan Rp17,013 juta untuk PAD, serta Rp 1,45 miliar, Rp 1,71 miliar, dan Rp 1,84 miliar untuk belanja modal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga menunjukkan tren positif, dengan angka berturut-turut 3,33%, 5,31%, dan 4,98%. Fluktuasi dan pertumbuhan ekonomi ini memberikan konteks yang menarik untuk melihat bagaimana PAD dan belanja modal berkontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta sejauh mana pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari research gap, fenomena, situasi yang melatarbelakangi masalah serta penelitian terdahulu yang bersangkutan paut dengan masalah, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: perbedaan metodologi penelitian, periode penelitian, karakteristik daerah yang diteliti, serta definisi dan pengukuran variabel yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji secara empiris “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”.

Jawa Tengah dipilih dalam penelitian ini karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah Kabupaten atau Kota yang cukup banyak dan pada 2022 Jateng meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya. “Kepala BPK RI Jateng, Ayub Amali menjelaskan pemeriksaan dilakukan pada dua jenis yakni laporan keuangan dan kinerja. Dari pemeriksaan itu, BPK menilai aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. Kemudian, pada 2021 SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibanding SiLPA 2020. Dengan sejumlah pemeriksaan tersebut, maka BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan 2021. Selain mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut, Ayub juga mengharapkan ke depan laporan keuangan dan kinerja semakin lebih baik lagi.” (Ahlu Dzikri, 2022).

Penghargaan kembali diraih Jateng pada Ajang The Best Regional Champion 2024. “Chairman Infobank Media Grup, Eko B Supriyanto mengatakan The Asian Post juga memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi dengan tingkat perekonomian daerah terbaik, kondisi sosial terbaik, daya saing terbaik, serta provinsi dengan masyarakat paling bahagia. Ditambahkan, berdasarkan hasil riset independen *The Asian Post Research*, pertumbuhan ekonomi Jateng 2023 mencapai 4,98 persen. Atas pertumbuhan ekonomi yang gemilang tersebut, Pemerintah Provinsi Jateng dinilai telah berperan penting, dan berkontribusi dalam pencapaian target-target nasional.” (Jateng, 2024).

Adanya penelitian ini dikarenakan ditemukannya perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta pentingnya memahami dinamika keuangan daerah pasca-pandemi COVID-19. Dengan menganalisis data periode 2021-2023 dan mengacu pada penelitian (Bilqis & Priyono, 2023), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan, serta peran moderasi pertumbuhan ekonomi dalam hubungan tersebut. Variabel moderasi pertumbuhan ekonomi dipilih karena dianggap memiliki peran penting dalam dinamika keuangan daerah, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi yang mendorong kesejahteraan umat dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan bersama, sejalan dengan nilai-nilai keadilan maupun kesejahteraan dalam Islam. Dari pernyataan diatas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan analisis secara lebih detail dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi masih sangat terbatas. Masalah utama yang dihadapi adalah dari sebagian besar peneliti sebelumnya ditemukan perbedaan hasil antara pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, serta cenderung fokus pada analisis masing-masing faktor variabel independen secara terpisah atau tidak membahas sekaligus dengan menambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada periode 2021-2023 (pasca-pandemi COVID-19).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan ?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan ?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan ?

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi dan sebagai acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana dalam memberikan masukan kepada pemangku kepentingan.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai penguat atau pelemah terhadap Kinerja Keuangan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi basis data untuk penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik atau mendalam, serta dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih akurat.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi Universitas Islam Sultan Agung tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai penguat atau pelemah terhadap Kinerja Keuangan.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Dengan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal serta adanya Pertumbuhan Ekonomi sebagai penguat atau pelemah terhadap

Kinerja Keuangan, pemerintah dapat menentukan prioritas anggaran yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu adanya penelitian ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan pengetahuan bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai penguat atau pelemah terhadap Kinerja Keuangan, serta dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah fondasi yang kokoh bagi sebuah penelitian. Dengan merujuk pada teori-teori yang relevan, peneliti tidak hanya memberikan legitimasi pada penelitiannya, tetapi juga menunjukkan bahwa penelitian tersebut telah dibangun di atas pengetahuan yang telah teruji. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian harus memperoleh justifikasi yang kuat melalui landasan teori ini. Teori-teori yang digunakan sebagai acuan haruslah dipilih secara cermat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2.1.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan teori yang juga menjelaskan tentang keagenan hubungan dalam sebuah kontrak. Mirip dengan *Agency Theory*, Teori *stewardship* juga menganalisis bagaimana memastikan akuntabilitas kinerja saat wewenang didelegasikan dari prinsipal ke steward. Teori *stewardship*, memiliki perbedaan dengan teori keagenan dalam pandangannya tentang motivasi agen (Haq & Syamsuddin, 2024). Teori *stewardship* menggambarkan agen bertindak bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok melainkan kepentingan bersama (publik) (Fuad et al., 2021). Motivasi altruistik dan orientasi pada tujuan bersama menjadi landasan utama perilaku agen dalam perspektif ini.

Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah keberadaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi bertindak sebagai agen yang dipercaya oleh masyarakat (*principal*) yang diwakili oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber kekayaan daerah dengan baik dan optimal. Oleh karena itu, sebagai agen dalam teori *stewardship*, pemerintah daerah akan melakukan hal tersebut bekerja sebaik-baiknya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya daerah dan keuangan untuk mencapai harapan masyarakat yang diinginkan yaitu kesejahteraan masyarakat, sebagai indikator keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori *stewardship* memandang manajer sebagai pengawas yang bertanggung jawab atas sumber daya organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, manajer (pejabat daerah) diharapkan dapat mengelola sumber daya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara optimal demi kepentingan masyarakat. Teori ini sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji bagaimana PAD mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah yang baik akan berupaya meningkatkan PAD dan mengalokasikannya secara efisien untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain PAD, belanja modal juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Belanja modal merupakan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Teori *stewardship* memprediksi bahwa pemerintah daerah yang baik akan membuat keputusan investasi yang bijak, yaitu investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian,

penelitian ini ingin menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel penting dalam penelitian ini. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa pemerintah daerah yang baik akan berupaya menciptakan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menjadi penentu seberapa efektif PAD dan belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2023, dengan mempertimbangkan peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka kinerja yang dilakukan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Sedangkan, Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk diukur. Analisis pengukuran kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh

posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur (Burhan et al., 2022).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya akan digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber PAD. Analisis rasio keuangan pada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga bisa diketahui kecenderungan yang terjadi. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat menggunakan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang merupakan salah satu alat ukur atau indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Rasio kemandirian daerah menghubungkan kapasitas daerah saat membiayai aktivitas pemerintah yang berasal dari PAD. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah bantuan dari pemerintah (Bilqis & Priyono, 2023). Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah maka dapat menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio RKKD berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bilqis & Priyono (2023) yaitu :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah}} \times 100$$

Keterangan :

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan rumus RKKD secara langsung mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, sehingga dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Rasio RKKD yang tinggi, didukung oleh PAD yang kuat dan alokasi belanja modal yang tepat sasaran, menjadi indikator penting bagi kinerja keuangan yang baik. Pertumbuhan ekonomi daerah, pada gilirannya, dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh kedua faktor tersebut. Teori *stewardship* memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami mengapa pemerintah daerah dengan RKKD tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga semakin mandiri suatu daerah secara finansial, yang mengindikasikan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya sendiri dan fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berperan sebagai steward yang bertanggung jawab, mengelola aset daerah secara hati-hati demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Amanda & Praptoyo, 2023) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diukur dengan menggunakan satuan rupiah. PAD memiliki peran krusial dalam menopang kinerja keuangan pemerintah daerah, karena pendapatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Ketergantungan pemerintah daerah pada PAD yang optimal akan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memberikan otonomi yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu :

1) Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan oleh perorangan atau badan usaha kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mencapai kesejahteraan rakyat seoptimal mungkin.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya adalah sumber pendapatan penyumbang

Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai user charge, user face, atau charging for service. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber selain pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya meliputi hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, serta pendapatan dari berbagai denda dan layanan publik seperti pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haq & Syamsuddin (2024) rumus yang digunakan untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut:

$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Pengelolaan kekayaan daerah yang}$

dipisahkan + lain-lain pendapatan yang sah.

Dari rumus PAD, teori *stewardship* memandang pemerintah daerah sebagai pengelola aset publik yang bertanggung jawab. Semakin tinggi PAD, semakin besar sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya, merupakan indikator kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi daerah. Dengan PAD yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menjalankan program-program pembangunan lainnya. Hal ini akan berdampak positif pada kinerja keuangan daerah, tercermin dari peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan kepercayaan publik. Dengan demikian, PAD menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan kinerja keuangan yang tinggi.

2.2.3 Belanja Modal

Menurut PMK Nomor 214/PMK.05/2013 yang menetapkan Bagan Akun Standar mencakup pengaturan terkait belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Contohnya, pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan produksi, dan sebagainya. Namun, tidak semua pengeluaran untuk hasil jangka panjang termasuk dalam belanja modal. Biaya pengelolaan limbah, biaya promosi, dan biaya penelitian dan pengembangan, misalnya, biasanya tidak termasuk dalam belanja modal, melainkan dianggap sebagai biaya operasional (Ramadana et al., 2023). Dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal, pemerintah daerah diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Bilqis & Priyono, 2023) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan perputaran belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal guna meningkatkan kepercayaan publik dan produktivitas masyarakat.

Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah yaitu pengeluaran/biaya yang digunakan pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan yaitu pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya yaitu pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi serta jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haq & Syamsuddin (2024) belanja modal dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Aset Tetap} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya.}$$

Dari rumus belanja modal, teori *stewardship* memandang manajer pemerintah

sebagai pengurus aset publik yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai aset tersebut demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks belanja modal, peningkatan alokasi anggaran untuk aset tetap seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur sejalan dengan prinsip *stewardship*. Dengan meningkatkan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan daerah.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yang umumnya diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto riil. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami peningkatan, maupun sebaliknya (Burhan et al., 2022). Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan PAD melalui perluasan basis pajak dan meningkatkan efisiensi belanja modal sehingga kinerja keuangan akan meningkat. Berdasarkan teori *stewardship*, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai moderasi yang memperkuat hubungan antara PAD dan belanja modal dengan kinerja keuangan. Pertumbuhan ekonomi menciptakan kondisi yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haq & Syamsuddin (2024) pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus :

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan :

G = Tingkat pertumbuhan ekonomi (dalam persen)

PDRB1 = Produk Domestik Regional Bruto pada periode akhir (misalnya, tahun ini)

PDRB0 = Produk Domestik Regional Bruto pada periode awal (misalnya, tahun sebelumnya)

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang mendasari dan sesuai dengan pertanyaan penelitian terkait “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”.

2.3.1 Penelitian terdahulu tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Terdapat penelitian antara lain : (Amanda & Praptoyo, 2023), (Atmoko & Khairudin, 2022), (Padang & Padang, 2023), (Noeng et al., 2023), dan (Bilqis & Priyono, 2023) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan pada pemerintah daerah. Sedangkan (Angraini & Hidayat, 2023) dalam penelitiannya memperoleh hasil adanya

pengaruh negatif PAD terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh (Aslindar et al., 2022) yang memperoleh hasil PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah. Berikut ini adalah tabel dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Peneliti, Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
(Amanda & Praptoyo, 2023)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Daerah Independen : X : Pendapatan Asli Daerah	Sampel : Laporan Realisasi Anggaran dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota 2019-2021. Metode analisis : Analisis regresi linier berganda.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
(Atmoko & Khairudin, 2022)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Pendapatan Asli Daerah	Sampel : 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung 2017-2019 dan diperoleh 45 sampel. Metode analisis : Analisis regresi data panel.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

(Padang & Padang, 2023)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Pendapatan Asli Daerah	Sampel : Seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi di Sumatera Utara, terdiri dari 33 kabupaten/kota untuk tahun 2014 s.d 2021 dan diperoleh 264 sampel. Metode analisis : Analisis regresi data panel dengan Eviews 7.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
(Noeng et al., 2023)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Pendapatan Asli Daerah	Sampel : Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 – 2020, yang terdiri dari 22 kabupaten/kota. Metode analisis : Analisis regresi linier berganda.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
(Bilqis & Priyono, 2023)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Pendapatan Asli Daerah	Sampel : Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020. Metode analisis : Analisis regresi linier berganda.	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
(Angraini & Hidayat, 2023)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Pendapatan	Sampel : Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Metode analisis : Analisis regresi data panel	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja

	Asli Daerah	menggunakan Eviews 10.	Keuangan Daerah.
(Aslindar et al., 2022)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Pendapatan Asli Daerah	Sampel : Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan diperoleh sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Metode analisis : Analisis regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.2 Penelitian terdahulu tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Terdapat penelitian antara lain : (Lestari & Nurkhin, 2023), (Ramadana et al., 2023), (Burhan et al., 2022), (Noeng et al., 2023), dan (Sinatraz & Suhartono, 2021) yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Bilqis & Priyono, 2023) menemukan hasil yang berbeda, bahwa belanja modal justru memberikan dampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dari penelitian (Padang & Padang, 2023) dan (Atmoko & Khairudin, 2022) dalam hasil penelitiannya, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah tabel dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Peneliti, Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
(Lestari & Nurkhin, 2023)	Dependenden : Y : Kinerja Keuangan Independenden : X : Belanja Modal	Sampel : Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan tahun pengamatan 2016-2018. Metode analisis : Analisis regresi data panel dan Analisis regresi linier berganda dengan Eviews 12.	Belanja Modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
(Ramadana et al., 2023)	Dependenden : Y : Kinerja Keuangan Independenden : X : Belanja Modal	Sampel : Seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh pada tahun 2017-2019, yang berjumlah 23 kabupaten/kota dan diperoleh sebanyak 69 sampel. Metode analisis : Analisis regresi linier berganda.	Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
(Burhan et al., 2022)	Dependenden : Y : Kinerja	Sampel : Seluruh kabupaten/kota yang ada di	Belanja Modal berpengaruh

	Keuangan Independen : X : Belanja Modal	provinsi di Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 24 kabupaten/kota untuk tahun 2016 sampai 2020 dan diperoleh 120 sampel. Metode analisis : Analisis Regresi linier berganda.	positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
(Noeng et al., 2023)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Belanja Modal	Sampel : Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 – 2020, yang terdiri dari 22 kabupaten/kota. Metode analisis : Analisis regresi linier berganda.	Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
(Sinatraz & Suhartono, 2021)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Belanja Modal	Sampel : Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Tahun 2019-2022 dan diperoleh 140 sampel. Metode analisis : Analisis regresi linier berganda.	Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
(Bilqis & Priyono, 2023)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Belanja Modal	Sampel : Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020. Metode analisis : Analisis regresi linier berganda.	Belanja Modal berpegaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

			Daerah.
(Padang & Padang, 2023)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Belanja Modal	Sampel : Seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi di Sumatera Utara, terdiri dari 33 kabupaten/kota untuk tahun 2014 s.d 2021 dan diperoleh sebanyak 264 sampel. Metode analisis : Analisis regresi data panel dengan Eviews 7.	Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
(Atmoko & Khairudin, 2022)	Dependen : Y : Kinerja Keuangan Independen : X : Belanja Modal	Sampel : 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung 2017-2019 dan diperoleh 45 sampel. Metode analisis : Analisis regresi data panel.	Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan memiliki pengaruh yang signifikan. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan PAD memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dengan PAD yang optimal,

daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengatur keuangannya. Selain itu, peningkatan PAD juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga berdampak positif pada perekonomian daerah secara keseluruhan dan kesejahteraan masyarakat.

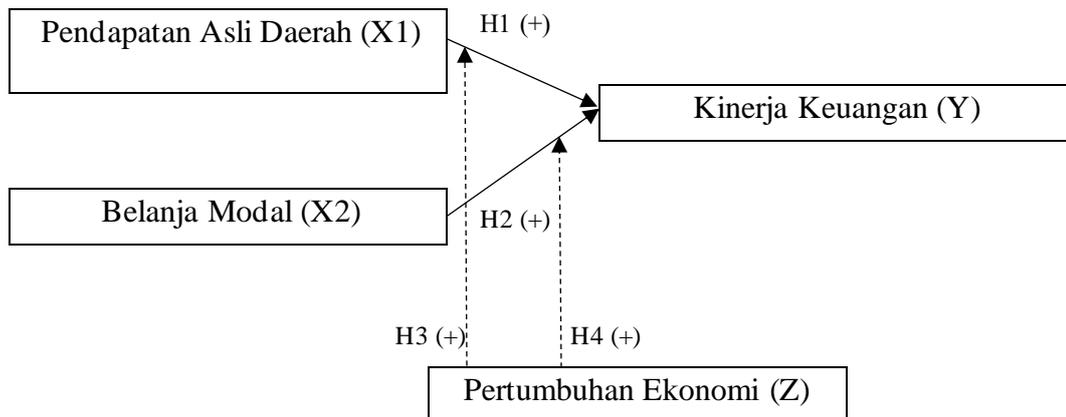
Hubungan antara Belanja Modal terhadap kinerja keuangan memiliki pengaruh yang signifikan. Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi akan berdampak positif pada pendapatan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur juga dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi investor, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, belanja modal yang efektif dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dapat berperan sebagai penguat atau pelemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan. Jika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka potensi PAD akan semakin besar. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas ekonomi akan mendorong perluasan basis pajak dan peningkatan efisiensi dalam mengelola sumber daya daerah. Dengan demikian, PAD yang diperoleh dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan berbagai program pembangunan lainnya. Peningkatan PAD yang signifikan sebagai

hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menciptakan kondisi yang kondusif bagi PAD untuk memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah, maka potensi peningkatan PAD juga akan terbatas, sehingga pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan mungkin tidak sebesar ketika pertumbuhan ekonomi tinggi.

Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai penguat atau pelemah pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka dampak positif belanja modal terhadap kinerja keuangan akan semakin besar. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif sehingga investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat lebih efektif mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah, maka efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan akan berkurang. Ini karena dalam kondisi ekonomi yang sulit, kemampuan pemerintah daerah untuk menyerap belanja modal dan mengubahnya menjadi output yang produktif akan terbatas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan belanja modal untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kajian pustaka dan uraian yang sudah dipaparkan, kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran krusial dalam menopang kinerja keuangan daerah karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. PAD sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ketika pemerintah daerah mampu mengelola PAD secara baik, maka kinerja keuangan daerah akan membaik. Hal ini dikarenakan PAD mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pusat, memberikan otonomi yang lebih luas dalam mengelola keuangan, serta menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, ketika PAD bisa dikelola secara baik maka bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut pernah diteliti oleh (Bilqis & Priyono, 2023). Semakin tinggi PAD yang dihasilkan, semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang memandang pemerintah daerah sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya daerah. Dengan PAD yang optimal, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta meningkatkan otonomi dalam mengelola keuangan. Namun, ketika PAD rendah maka pemerintah daerah akan bergantung pada pusat. Berdasarkan penelitian terdahulu (Bilqis & Priyono, 2023), yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2.5.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis aset yang dibeli, waktu pengembalian investasi, dan kondisi ekonomi daerah secara umum. Jika belanja modal tidak dilakukan secara tepat maka dapat menurunkan kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, jika belanja modal dilakukan secara tepat dan efektif, maka dapat meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang. Dengan kata lain, keberhasilan suatu daerah dalam

mengelola keuangannya sangat bergantung pada bagaimana mereka mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran belanja modal.

Belanja modal bagian dari investasi pemerintah daerah yang diharapkan meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang, seperti peningkatan infrastruktur dan produktivitas masyarakat. Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai agen publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, termasuk belanja modal, secara optimal demi kepentingan masyarakat. Peningkatan alokasi belanja modal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Nurkhin, 2023) menunjukkan hasil Belanja Modal berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2.5.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya sendiri dan fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan basis pajak dan peningkatan efisiensi belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

pada gilirannya, dapat memperkuat kinerja keuangan daerah dengan meningkatkan PAD. Oleh karena itu, terdapat hubungan timbal balik yang kuat antara PAD, kinerja keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pernah diteliti (Haq & Syamsuddin, 2024). Pertumbuhan ekonomi yang besar pada suatu daerah dapat memperbesar PAD melalui pajak, retribusi daerah, dan pendapatan yang sah lainnya. Dari penelitian tersebut dapat diketahui, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga potensi PAD akan semakin besar. Ini berarti, pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan positif pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan. Maka dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi.

2.5.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

Kinerja keuangan pemerintah diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah terhadap bantuan pemerintah, yang menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah. Belanja modal, seperti investasi tanah, bangunan, dan peralatan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan belanja modal akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan, dan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memperkuat hubungan ini.

Penelitian (Wibowo & Monalisa, 2019) menjelaskan semakin besar pengeluaran pemerintah yang berasal dari belanja modal, maka pertumbuhan

ekonomi akan semakin meningkat. Penelitian tersebut dapat mendorong peningkatan belanja modal yang berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan positif antara belanja modal dan kinerja keuangan, sehingga pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, dampak positif belanja modal terhadap kinerja keuangan akan semakin besar. Maka dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini juga disebut sebagai metode ilmiah/scientific, disebabkan metode ini memiliki kaidah-kaidah ilmiah yang terpenuhi yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis (Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang dapat mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022). Populasi dalam penelitian juga dapat diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis yang dimaksud adalah unit/satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Dalam penelitian ini, populasinya

mencakup 35 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022). Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sensus yaitu semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian dengan analisis data menggunakan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023.

3.3 Jenis dan Sumber data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber lain baik organisasi, lembaga, badan dan institusi yang telah tersedia untuk digunakan sesuai dengan keperluan yang membutuhkan data (Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022).

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data melalui situs resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jateng pada situs <https://jateng.bps.go.id/id>, situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melalui situs resmi masing-masing.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara pengambilan data atau informasi dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku (Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dimana melibatkan pengambilan data dan informasi dari buku, arsip, dokumen, angka, gambar, serta format laporan dan keterangan yang dapat digunakan untuk penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengunduh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021-2023 yang berasal dari situs resmi DJPK maupun situs resmi masing-masing Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, serta berasal dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang bergantung pada variabel independen. Sederhananya, variabel dependen akan berubah seiring dengan perubahan nilai variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan. Kinerja keuangan pada pemerintah daerah merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangannya dalam satu periode anggaran. Dalam menentukan kinerja keuangan, dapat menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan

jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah bantuan dari pemerintah (Bilqis & Priyono, 2023). Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah maka dapat menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio RKKD berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bilqis & Priyono (2023) yaitu :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah}} \times 100$$

Keterangan :

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Jika semakin tinggi nilai RKKD, semakin mandiri suatu daerah secara finansial, yang mengindikasikan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya sendiri dan fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai RKKD, semakin tergantung suatu daerah secara finansial, yang mengindikasikan keterbatasan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya sendiri dan ketergantungan pada pusat dalam mengalokasikan anggaran.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan pada variabel lain (variabel dependen). Variabel independen yang terdapat didalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah atau pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berada di dalam wilayahnya sendiri. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haq & Syamsuddin (2024) rumus yang digunakan untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan yang sah.}$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin baik pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari dalam daerah, maka semakin mandiri pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika PAD rendah, maka pemerintah daerah akan semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi ini dapat menghambat otonomi daerah dan mengurangi fleksibilitas dalam penganggaran.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari tahun anggaran atau memiliki manfaat jangka panjang, menambah suatu aset daerah dan memperbanyak belanja operasi yang bersifat awam. Belanja modal pelayanan publik di gunakan dalam mendanai kegiatan

investasi perbaikan infrastruktur publik dimana hasilnya dapat berguna bagi masyarakat. Contohnya, pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan produksi, dan sebagainya. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haq & Syamsuddin (2024) rumus untuk menghitung belanja modal yaitu :

Belanja Modal = Belanja Aset Tetap + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Dari rumus tersebut maka semakin tinggi belanja modal, semakin berpotensi meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Sebaliknya jika semakin rendah belanja modal maka semakin terbatas potensi peningkatan kinerja keuangan.

3.5.3 Variabel Moderasi (Z)

Variabel Moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat, melemahkan, atau bahkan mengubah arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam pemerintah daerah merujuk pada peningkatan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haq & Syamsuddin (2024) pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus :

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan :

G = Tingkat pertumbuhan ekonomi (dalam persen)

PDRB1 = Produk Domestik Regional Bruto pada periode akhir (misalnya, tahun ini)

PDRB0 = Produk Domestik Regional Bruto pada periode awal (misalnya, tahun sebelumnya)

Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dapat berperan sebagai penguat atau pelemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan. Jika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka potensi PAD akan semakin besar. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas ekonomi akan mendorong perluasan basis pajak dan peningkatan efisiensi dalam mengelola sumber daya daerah. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah, maka potensi peningkatan PAD juga akan terbatas, sehingga pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan mungkin tidak sebesar ketika pertumbuhan ekonomi tinggi.

Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai penguat atau pelemah pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka dampak positif belanja modal terhadap kinerja keuangan akan semakin besar. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah, maka efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan akan berkurang.

Berdasarkan uraian diatas, maka definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel & Definisi Operasional	Indikator
1	<p>Y = Kinerja Keuangan</p> <p>Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dalam upaya mendukung sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat (Aslindar et al., 2022).</p>	$RKKD = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah} \times 100$ <p>Mengacu pada penelitian (Bilqis & Priyono, 2023)</p>
2	<p>X1 = Pendapatan Asli daerah</p> <p>Pendapatan Asli Daerah yaitu segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah (Fernandes & Putri, 2022).</p>	$PAD = Pajak\ daerah + Retribusi\ daerah + Pengelolaan\ kekayaan\ daerah\ yang\ dipisahkan + lain-lain\ pendapatan\ yang\ sah.$ <p>Mengacu pada penelitian (Haq & Syamsuddin, 2024)</p>

3	<p>X2 = Belanja Modal</p> <p>Belanja modal adalah suatu belanja pemerintah daerah yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan perputaran belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal guna meningkatkan kepercayaan publik dan produktivitas masyarakat (Bilqis & Priyono, 2023).</p>	<p>Belanja Modal = Belanja Aset Tetap + Belanja Aset Tetap Lainnya</p> <p>Mengacu pada penelitian (Haq & Syamsuddin, 2024)</p>
4	<p>Variabel Moderasi = Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan perkapita dengan Produk domestik regional bruto (PDRB), salah satu pengukuran yang berdasarkan total nilai barang dan jasa yang ada di daerah atau lokal (Wibowo & Monalisa, 2019).</p>	$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ <p>Mengacu pada penelitian (Haq & Syamsuddin, 2024)</p>

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian

menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan (Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan moderasi yang didukung menggunakan program aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 29. Penggunaan analisis regresi linier berganda dengan moderasi sangat cocok untuk penelitian ini karena bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Dengan adanya variabel moderasi, penelitian ini mampu mengungkap kondisi-kondisi tertentu yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif dilaksanakan sebelum melaksanakan pengujian terhadap model dan hipotesis. Menurut Ghozali (2018) uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan valid dan dapat diandalkan. Dengan kata lain, uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar model regresi dapat memberikan estimasi yang tidak bias, konsisten, dan efisien. Uji asumsi klasik dilakukan dengan cara menguji normalitas,

multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas yang akan dilaksanakan pada penelitian ini (Ghozali, 2018).

3.6.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini adanya uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

- Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ berarti menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.
- Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ berarti menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2018) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika pada variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini dikatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal yaitu variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, serta dari nilai *variance inflation factor* (VIF).

- Jika nilai toleransi $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, berarti bahwa terjadi multikolinieritas dalam penelitian.

- Jika nilai toleransi $> 0,10$ dan $VIF < 10$, berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian. Oleh karena itu, nilai toleransi yang kecil sama dengan nilai VIF yang tinggi, menunjukkan adanya kolonieritasnya tinggi. Nilai cut off yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018).

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini adanya uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, namun apabila berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2018) model regresi yang baik yaitu yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilaksanakan dengan menggunakan Uji Glejser yaitu dengan cara mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen, dengan ketentuan jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pada kasus model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Model regresi dapat dikatakan baik apabila model regresi bebas dari autokorelasi.

Uji Durbin-Watson (DW test) menguji ada atau tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2018). Kriteria Uji Durbin-Watson yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kriteria Pengujian Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Diterima	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : (Ghozali, 2018)

Keterangan :

d = Durbin Watson, d_u = Durbin Watson Upper, d_l = Durbin Watson Lower.

3.6.3 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi, maka dilakukan dengan uji interaksi yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA). *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah alat analisis yang menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi (Ghozali, 2018). Model persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Nilai Koefisien Regresi Berganda

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Belanja Modal

Z = Pertumbuhan Ekonomi

ε = Standar Error

3.6.4 Uji *Goodness of Fit* Model

Menurut Ghozali (2018) menyatakan keakuratan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai dapat diukur melalui Goodness of fitnya. Secara statistik, paling tidak dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi maupun nilai statistik F. Perhitungan statistik dapat disebut signifikan secara statistik jika nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, jika nilai uji statistik berada dalam daerah dimana H_0 yang diterima, maka dianggap tidak signifikan (Ghozali, 2018).

3.6.4.1 Uji F

Tujuan Uji Statistik F dalam penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dari variabel independen secara simultan (bersama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji Statistik F dilakukan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$ maka variabel independen secara simultan ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti variabel independen secara simultan tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang ada sudah fit dan dapat digunakan pada pengujian selanjutnya.

3.6.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini memiliki lebih dari dua variabel independen, sehingga digunakan adjusted R^2 . Adjusted R^2 mendekati satu berarti model yang digunakan semakin baik dalam memprediksi nilai variabel dependen.. Sebaliknya, ketika R^2 mendekati nol, hal ini berarti model lebih lemah dalam menjelaskan variasi variabel dependen atau variabel independen yang dimasukkan dalam model tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Untuk dapat mengetahui hipotesis-hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini dapat menggunakan analisis regresi melalui uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05. Kriteria pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau nilai t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau nilai t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi uji statistik t dengan menambahkan variabel moderasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengujian Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan
 $H_0 : \beta \leq 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
 $H_a : \beta > 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.
2. Pengujian Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan
 $H_0 : \beta \leq 0$, artinya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
 $H_a : \beta > 0$, artinya Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

3. Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

$H_0 : \beta \leq 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi.

$H_a : \beta > 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi.

4. Pengujian Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

$H_0 : \beta \leq 0$, artinya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi.

$H_a : \beta > 0$, artinya Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021-2023 melalui situs resmi dari <https://jateng.bps.go.id/id>, situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, serta situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Periode 2021-2023 merupakan fase pasca pandemi COVID-19, dimana pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam pemulihan ekonomi. PAD dan Belanja Modal selama 3 tahun mengalami peningkatan yang signifikan namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut mengalami fluktuasi. Hal ini memberikan konteks yang menarik untuk melihat bagaimana PAD dan belanja modal berkontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta sejauh mana pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemahaman ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tangguh dan responsif dimasa depan.

Penekanan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021-2023 dapat menawarkan analisis lebih dalam tentang kondisi pemerintah daerah pasca pandemi COVID-19, sehingga dapat dengan jelas menggambarkan korelasi antara variabel yang diteliti

maupun moderasinya. Periode ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memahami efek jangka panjang dari faktor ekonomi maupun keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pasca pandemi COVID-19, serta bagaimana dampaknya.

Sampel pada penelitian sebanyak 35 kabupaten/kota yang diperoleh dengan menggunakan metode sensus sampling. Data berupa *pooled* data yaitu penggabungan *cross section* dan *time series* selama 3 tahun, dengan demikian jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 105 sampel data.

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	35
Tahun Pengamatan	3
Total Sampel (35 x 3)	105

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah uji yang memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan

distribusi) (Ghozali, 2018). Analisis deskriptif pada penelitian ini mencakup variabel kinerja keuangan, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (X1)	105	240.959.878.632	2.835.150.144.867	487.225.393.588,86	384.889.832.214,001
Belanja Modal (X2)	105	75.192.210.131	1.089.358.396.203	305.722.700.870,13	164.844.464.887,084
Kinerja Keuangan (Y)	105	72	146	107,73	15,201
Pertumbuhan Ekonomi (Z)	105	-1,54	6,33	4,6257	1,19955
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 29 (2025)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka dapat dijelaskan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut :

Variabel dependen (Y) dalam dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pada pemerintah daerah dengan nilai maksimum sebesar 146 yang dicapai oleh Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum sebesar 72 yang dicapai Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021. Nilai rata- rata sebesar 107,73 dengan standar deviasi yaitu 15,201. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan terendah (sebaran datanya merata).

Variabel independen (X1) pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dengan nilai maksimum sebesar 2.835.150.144.867 yang dicapai oleh Kota Semarang pada tahun 2023. Sedangkan nilai minimum sebesar 240.959.878.632 yang dicapai Kota Salatiga pada tahun 2022. Nilai rata-rata sebesar 487.225.393.588,86 dengan standar deviasi yaitu 384.889.832.214,001. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan terendah (sebaran datanya merata).

Variabel independen (X2) pada penelitian ini adalah belanja modal dengan nilai maksimum sebesar 1.089.358.396.203 yang dicapai oleh Kota Semarang pada tahun 2023. Sedangkan nilai minimum sebesar 75.192.210.131 yang dicapai Kota Salatiga pada tahun 2022. Nilai rata-rata sebesar 305.722.700.870,13 dengan standar deviasi yaitu 164.844.464.887,084. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan terendah (sebaran datanya merata).

Variabel moderasi (Z) pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan nilai maksimum sebesar 6,33 yang dicapai oleh Kabupaten Boyolali pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimum sebesar -1,54 yang dicapai Kabupaten Kudus pada tahun 2021. Nilai rata-rata sebesar 4,6257 dengan standar deviasi yaitu 1,19955. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya tidak terjadi penyimpangan data, antara data tertinggi dan terendah (sebaran datanya merata).

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* :

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13244413
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,071
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,193

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 29 (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test dengan total data sampel sebanyak 105 data, menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov diperoleh sebesar 0,193 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan lulus uji normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	,547	1,829
	Belanja Modal (X2)	,543	1,840
	Pertumbuhan Ekonomi (Z)	,991	1,009

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 29 (2025)

Berdasarkan pada tabel 4.4 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel penelitian pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 serta nilai Varians Inflation Factors (VIF) yang lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel, dengan demikian terbebas dari multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Berikut merupakan tabel hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :

Tabel 4.5**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,534	,584		,915	,362
Pendapatan Asli Daerah (X1)	,021	,028	,097	,735	,464
Belanja Modal (X2)	-,037	,025	-,191	-1,440	,153
Pertumbuhan Ekonomi (Z)	-,019	,022	-,083	-,842	,402

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 29 (2025)

Dari tabel hasil uji heteroskedastisitas diatas, dapat dilihat bahwa semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal serta variabel moderasi yaitu Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai probabilitas $> 0,05$ atau 5%, sehingga nilai tersebut dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,400 ^a	,160	,135	,12905	1,873
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi (Z), Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2)					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)					

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 29 (2025)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diperoleh hasil Durbin-Watson test sebesar 1,873. Dimana $1,873 > 1,7411$ (dU), serta $1,873 < 2,2589$ (4-dU). Sehingga nilai DW sudah sesuai dengan ketentuan yakni $1,7411 < 1,873 < 2,2589$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.4 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi, maka dilakukan dengan uji interaksi yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil dari uji MRA disajikan pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji MRA

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,641	,701		6,617	<,001
	X1	-,153	,052	-,458	-2,922	,004
	X2	,128	,053	,428	2,424	,017
	Z	-,561	,090	-1,603	-6,263	<,001
	X1*Z	,219	,045	12,357	4,873	<,001
	X2*Z	-,206	,046	-11,268	-4,445	<,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 29 (2025)

Berdasarkan hasil uji MRA pada tabel 4.7 maka persamannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \varepsilon$$

$$Y = 4,641 - 0,153X_1 + 0,128X_2 - 0,561Z + 0,219X_1 * Z - 0,206X_2 * Z + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Nilai Koefisien Regresi Berganda

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Belanja Modal

Z = Pertumbuhan Ekonomi

ε = Standar Error

Berdasarkan hasil persamaan MRA pada tabel 4.7, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta 4,641 artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Z), Pendapatan Asli Daerah*Pertumbuhan Ekonomi (X1*Z), Belanja Modal*Pertumbuhan Ekonomi (X2*Z) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y).
2. Nilai koefisien regresi β_1 variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) bernilai - 0,153 artinya apabila nilai koefisien β_1 turun 0,153 satuan, maka kinerja keuangan akan naik sebesar 0,153.
3. Nilai koefisien regresi β_2 variabel Belanja Modal (X2) bernilai 0,128 artinya apabila nilai koefisien β_2 naik 0,128 satuan, maka kinerja keuangan akan naik sebesar 0,128.
4. Nilai koefisien regresi β_3 variabel Pertumbuhan Ekonomi (Z) bernilai - 0,561 artinya apabila nilai koefisien β_3 turun 0,561 satuan, maka kinerja keuangan akan naik sebesar 0,561.
5. Nilai koefisien regresi β_4 variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Pertumbuhan Ekonomi (Z) bernilai 0,219 artinya apabila nilai koefisien β_4 naik 0,219 satuan, maka kinerja keuangan akan naik sebesar 0,219.
6. Nilai koefisien regresi β_5 variabel Belanja Modal (X2) dengan Pertumbuhan Ekonomi (Z) bernilai -0,206 artinya apabila nilai koefisien β_5 turun 0,206 satuan, maka kinerja keuangan akan naik sebesar 0,206.

4.5 Uji Goodness of Fit Model

4.5.1 Uji F

Hasil uji F dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8

Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,929	5	,186	17,310	<,001 ^b
	Residual	1,052	98	,011		
	Total	1,982	103			

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 29 (2025)

Berdasarkan hasil uji F yang terdapat pada tabel 4.8 nilai F menunjukkan angka 17,310 dengan tingkat signifikansi <0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan (Y).

4.5.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi (R^2) :

Tabel 4.9

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,685 ^a	,469	,442	,10363

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 29 (2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,442 dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Z), Pendapatan Asli Daerah * Pertumbuhan Ekonomi ($X1*Z$), Belanja Modal * Pertumbuhan Ekonomi ($X2*Z$) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) sebesar 44,2%, sedangkan sisanya yaitu 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

4.6 Pengujian Hipotesis

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 halaman 62, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,153 dengan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan ditolak.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,128 dengan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan diterima.

3. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,219 dengan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar $<,001$ lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan diterima.

4. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,206 dengan arah negatif dan memiliki signifikansi sebesar $<,001$ lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan ditolak.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah PAD maka kinerja keuangan semakin turun.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang memandang dengan PAD yang optimal, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam

mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta meningkatkan otonomi dalam mengelola keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, ketika PAD rendah maka pemerintah daerah akan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin rendah PAD, maka pemerintah daerah semakin tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menjalankan program-program pembangunan lainnya. Hal ini akan berdampak negatif pada kinerja keuangan daerah, tercermin dari penurunan efisiensi penggunaan anggaran, tidak adanya perbaikan laporan keuangan, dan penurunan kepercayaan publik.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Bilqis & Priyono, 2023), yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Namun, penelitian sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Aslindar et al., 2022) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

4.7.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan secara tepat dan efektif maka, kinerja keuangan semakin meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai agen publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, termasuk belanja modal, secara optimal demi kepentingan masyarakat. Peningkatan alokasi belanja modal dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal, maka semakin berpotensi meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti (Lestari & Nurkhin, 2023), (Ramadana et al., 2023), (Burhan et al., 2022), (Noeng et al., 2023), dan (Sinatraz & Suhartono, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

4.7.3 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi terbukti mampu memperkuat hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, yang tercermin pada Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka akan semakin meningkatkan Kinerja Keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang mengasumsikan bahwa pemerintah daerah yang baik akan berupaya menciptakan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan

pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang besar pada suatu daerah dapat memperbesar PAD melalui pajak, retribusi daerah, dan pendapatan yang sah lainnya. Jika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah, sehingga potensi PAD akan semakin besar. Ini berarti, pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan positif pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Haq & Syamsuddin, 2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan positif pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan.

4.7.4 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak terbukti mampu memoderasi hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berperan memperlemah pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan. Jika pertumbuhan ekonomi rendah, maka efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan akan berkurang.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang mengasumsikan bahwa pemerintah daerah yang baik akan berupaya menciptakan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Belanja modal, seperti investasi tanah, bangunan, dan peralatan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan belanja modal akan berdampak positif terhadap kinerja

keuangan, namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memperlemah hubungan ini.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wibowo & Monalisa, 2019) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memperkuat hubungan positif antara Belanja Modal dan Kinerja Keuangan pada pemerintah daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan alat statistik SPSS versi 29 dan analisis hasil yang telah dijabarkan pada bab 4, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, maka hipotesis pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah belum secara maksimal mengelola PAD secara baik, maka kinerja keuangan daerah akan turun.
2. Belanja Modal terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, maka hipotesis kedua diterima. Peningkatan alokasi belanja modal dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal, maka semakin berpotensi meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang.
3. Pertumbuhan Ekonomi terbukti mampu memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan, sehingga H3 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan jika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin memperkuat hubungan positif pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan.

4. Pertumbuhan Ekonomi tidak terbukti mampu memoderasi hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan, sehingga H4 ditolak. Hal ini menunjukkan semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka belanja modal akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Obyek pada penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021-2023. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada obyek diluar penelitian ini karena memiliki karakteristik yang berbeda.
2. Untuk Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), Pertumbuhan Ekonomi (Z), Pendapatan Asli Daerah * Pertumbuhan Ekonomi (X1*Z), Belanja Modal * Pertumbuhan Ekonomi (X2*Z) hanya dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan (Y) sebesar 44,2%. Sedangkan sisanya yaitu 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Untuk itu perlu menggunakan variabel yang lain untuk mempengaruhi Kinerja Keuangan pada pemerintah daerah di luar model penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mengidentifikasi kendala serta kelemahan dalam proses pengumpulan dan pemanfaatannya. Langkah ini penting agar PAD benar-benar dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa alokasi belanja modal difokuskan pada sektor-sektor produktif yang mampu didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya semakin memperluas populasi yang digunakan, tidak hanya berfokus pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah saja, tetapi pada daerah-daerah lainnya, serta dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan menambahkan periode tahun terbaru.

Selain itu, perlu untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian dengan menambah lebih banyak variabel lain serta berbagai aspek lain seperti non keuangan contohnya transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, kompetensi aparatur karena kinerja keuangan pemerintah daerah juga terkait dengan kebijakan dan manusia yang menjalankannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahlu Dzikri. (2022). *Pemprov Jateng Raih WTP Lagi, Ganjar: Bukan Berarti Kita Asyik-asyik Aja*. DetikJateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6095164/pemprov-jateng-raih-wtp-lagi-ganjar-bukan-berarti-kita-asyik-asyik-aja>
- Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5).
- Angraini, N., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 141–163. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/737>
- Aslindar, D. A., Pratika, H., & Hapsari, N. (2022). Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 37–50.
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>
- Burhan, M., Kartini, K., & Said, D. (2022). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Buhuts*, 18, 296–310. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2946>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Fuad, K., & Handayani, R. (2020). *Determinants of Regional Government Performance: Islamic Work Ethics as Moderating Variable*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-8-2020.2303269>

- Fuad, K., Winarsih, & Nisa, K. (2021). A model for strengthening the quality of local government financial statements. In *Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol. 1194 AISC* (Issue 71). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50454-0_44
- Ghozali, I. (2018). Application of multivariate analysis with IBM SPSS 25 Program. In *Agency* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–99).
- Haq, M. I., & Syamsuddin. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 22(1), 22–36.
- Jateng, H. (2024). *Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Ajang The Best Regional Champion 2024*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-raih-3-penghargaan-ajang-the-best-regional-champion-2024/>
- Lestari, R., & Nurkhin, A. (2023). Determinant Factors of Local Government Financial Performance (Using Financial Condition Dimension as Indicator). *Indonesian Management and Accounting Research*, 20(2), 335–360. <https://doi.org/10.25105/imar.v20i2.13968>
- Noeng, A. Y., Ardini, L., & Kurnia, K. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(4), 2905–2916. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1689>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jrak*, 9(2), 303–318. www.djpk.depkeu.go.id
- Ph.D. Ummul Aiman, S. P. D. K. A. S. H. M. A. Ciq. M. J. M. P., Suryadin Hasda, M. P. Z. F., M.Kes. Masita, M. P. I. N. T. S. K., & M.Pd. Meilida Eka Sari, M. P. M. K. N. A. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniari, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Sinatraz, V., & Suhartono, S. (2021). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6(1999), 1–13.

Wibowo, A., & Monalisa, M. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(2), 212–225. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.185>

